



Sosialisasi Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Bandur Picak

Rika Handayani^{1*}, Syaprianto²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau

^{1*}rikahandayani469@gmail.com , ²syaprianto@soc.uir.ac.id

Abstrak

Pelayanan administrasi pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola publik, termasuk pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dokumen yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, SKTM merupakan jenis layanan administrasi yang paling sering diajukan, dengan jumlah permohonan sebanyak 196 layanan dari total 554 pelayanan administrasi pada periode Januari–Oktober 2025. Kegiatan pengabdian melalui program magang ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelayanan SKTM dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan SKTM di Desa Bandur Picak. Metode pelaksanaan meliputi observasi, sosialisasi, dokumentasi, dan melakukan proses pelayanan, mulai dari verifikasi berkas, penyusunan draf surat, hingga pencatatan dalam buku register pelayanan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian telah berjalan baik, pelayanan SKTM telah sesuai dengan SOP, waktu penyelesaian rata-rata ± 5 menit per surat, serta diterima secara baik oleh masyarakat. Kolaborasi ini memberikan manfaat berupa pembagian tugas yang lebih terstruktur dan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai praktik pelayanan administrasi pemerintahan desa.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemerintah Desa, Program Magang, SKTM, Sosialisasi

Abstract

Village administrative services are an important part of public governance, including the issuance of the Certificate of Financial Hardship (SKTM) as a document required by the community to access social assistance, education, and health services. In Bandur Picak Village, Koto Kampar Hulu Subdistrict, Kampar Regency, SKTM is the most frequently requested type of administrative service, with a total of 196 requests out of 554 administrative services during the period of January–October 2025. This community service activity through an internship program aims to disseminate information about SKTM services in order to improve the effectiveness of SKTM service implementation in Bandur Picak Village. The implementation methods include observation, socialization, documentation, and participation in the service process, starting from document verification, drafting of letters, to recording in the service register book. The results show that the program has been well implemented, SKTM services have followed the Standard Operating Procedures (SOP), with an average completion time of approximately five minutes per letter, and have been well received by the community. This collaboration provides benefits in the form of a more structured division of tasks and strengthens students' understanding of village administrative service practices.

Keywords: Public Service, Village Government, Internship Program, SKTM, Socialization

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Lestari dan Santoso, 2022). Sebagai inti dari fungsi negara, pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan layanan administratif dengan cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di Indonesia, reformasi pelayanan publik terus dimasifkan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah, termasuk di tingkat pemerintahan desa yang memegang peran strategis dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Pemerintah desa adalah bagian dari struktur pemerintahan nasional yang berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa beserta perangkatnya yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa, termasuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa (Juniati, 2022).

Pelayanan publik yang efektif oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kohesi sosial, memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan memperdalam kepercayaan terhadap pemerintah dan administrasi publik (Bulunggodu *et al.*, 2024). Dari perspektif konseptual, efektivitas pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai

sejauh mana keluaran dan hasil pelayanan mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan kepuasan penerima layanan.

Salah satu bentuk pelayanan publik di tingkat desa adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang berfungsi sebagai dokumen resmi bagi warga kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan dari pemerintah. Pelayanan administrasi seperti SKTM menjadi penting karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan kesejahteraan sosial (Susanti dan Rijali, 2023).

Dalam pelaksanaan di lapangan, cakupan pelayanan administrasi dasar di tingkat desa masih menunjukkan tantangan signifikan. Sebagai contoh, penelitian mengenai layanan administrasi kependudukan online di Kabupaten Garut menemukan bahwa meskipun sistem daring telah diterapkan, jumlah permohonan layanan online jauh lebih sedikit dibanding layanan manual, sehingga produktivitas dan efisiensi belum maksimal (Rahmat dan Pasciana, 2023). Penelitian lain di Desa Sibalaya Utara, Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih terbatas pada aspek ketepatan, meskipun prosedur sudah berjalan (Puspitasari dan Syugiarto, 2024). Data ini menunjukkan bahwa layanan administratif seperti SKTM menjadi instrumen penting dalam menjamin akses masyarakat miskin ke berbagai program sosial, implementasinya di lapangan belum bebas hambatan.

Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang tahun 2025, tercatat bahwa SKTM merupakan jenis layanan dengan permintaan tertinggi dibandingkan dengan jenis pelayanan administrasi lainnya. Tingginya frekuensi permohonan tersebut menunjukkan bahwa SKTM memiliki peran penting sebagai dokumen pendukung bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh akses terhadap program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan SKTM tetap memerlukan ketelitian, ketepatan administrasi, dan koordinasi antarperangkat desa agar dokumen yang diterbitkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pelayanan SKTM menjadi langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai prosedur pelayanan publik yang baik, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur desa dalam memberikan layanan yang responsif dan efisien.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui program magang mahasiswa, program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat, sekaligus mengaplikasikan pengetahuan akademik ke dalam konteks nyata. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Artikel pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan sosialisasi oleh mahasiswa magang dan Pemerintah Desa Bandur Picak terkait pelayanan SKTM, dengan fokus pada pelaksanaan tugas pelayanan administratif, pembagian peran, serta dinamika interaksi dalam proses pelayanan. menganalisis respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program magang ini menekankan kegiatan sosialisasi yang terkait pelayanan administrasi di Kantor Desa Bandur Picak.

Tahapan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan mulai dari bulan Juli hingga September 2025. Pelaksanaan pengabdian melalui kegiatan magang di Desa Bandur Picak dilakukan secara bertahap, dimulai dari proses observasi, pengenalan lingkungan, hingga sosialisasi langsung terkait pelayanan administrasi. Kegiatan pengabdian ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu: observasi awal, pengenalan lingkungan, orientasi tugas, melakukan sosialisasi dan pembuatan SKTM, serta dokumentasi dan refleksi. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi Awal

Tahap pertama diawali dengan kegiatan observasi untuk mengenali kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan administrasi di Desa Bandur Picak. Mahasiswa melakukan pengamatan terhadap proses pelayanan publik di kantor desa, terutama mengenai mekanisme penerbitan SKTM, pihak-pihak yang terlibat, serta kendala yang sering dihadapi masyarakat. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana sosialisasi dan strategi pelibatan masyarakat.

2. Pengenalan Lingkungan dan Orientasi Tugas

Setelah observasi, mahasiswa melakukan pengenalan lingkungan kerja dan koordinasi dengan aparatur desa. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan arahan mengenai tugas-tugas selama magang, mempelajari SOP pelayanan SKTM, serta memahami struktur organisasi dan pembagian kerja di pemerintahan desa. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara mahasiswa dan perangkat desa.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan SKTM

Tahapan inti dari kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi pelayanan SKTM kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan, fungsi, dan prosedur pengurusan SKTM secara langsung kepada warga desa. Selain itu, mahasiswa juga berpartisipasi dalam pelayanan administrasi desa, seperti membantu proses verifikasi berkas, penyusunan draf surat, hingga pencatatan dalam register SKTM. Melalui tahapan ini, mahasiswa

tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa.

4. Dokumentasi dan Refleksi Kegiatan

Tahapan terakhir mencakup kegiatan pendokumentasian seluruh proses pengabdian, mulai dari observasi hingga pelaksanaan sosialisasi. Dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto, catatan kegiatan, dan laporan akhir magang. Selain itu, mahasiswa juga melakukan refleksi bersama aparat desa untuk mengevaluasi hasil kegiatan, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan administrasi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelayanan SKTM di Desa Bandur Picak

Pelayanan administrasi di Desa Bandur Picak dilaksanakan di kantor desa dengan jadwal kerja Senin hingga Jumat pukul 08.00–15.00 WIB. Berdasarkan data dari dokumentasi desa selama periode Januari hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 554 layanan administrasi yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Dari jumlah tersebut, 196 di antaranya merupakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sehingga menjadikannya jenis layanan dengan volume tertinggi dibandingkan jenis surat lainnya seperti Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Keterangan Domisili.

Prosedur penerbitan SKTM dimulai dari tahap penerimaan berkas, pemeriksaan data oleh perangkat desa, pencatatan dalam buku register, hingga pencetakan surat dan penandatanganan oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil observasi, waktu penyelesaian untuk satu surat rata-rata sekitar lima menit, tergantung kelengkapan berkas dan ketersediaan perangkat pelayanan, dan tanpa biaya administrasi. Masyarakat dapat langsung mengambil surat pada hari yang sama tanpa dikenakan biaya administrasi. Proses ini menunjukkan adanya komitmen aparat desa dalam memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Choiriyah (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pelayanan publik desa ditandai oleh kecepatan, transparansi, serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat desa. Wicaksono *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik. Artinya secara umum, pelayanan SKTM telah memiliki alur kerja yang jelas, mudah diikuti, dan dapat diterima masyarakat. Dengan demikian, pelayanan administrasi di Desa Bandur Picak dapat dikategorikan baik karena telah memenuhi prinsip kecepatan, kemudahan, dan akuntabilitas, meskipun pengembangan sistem digital dapat menjadi peluang peningkatan mutu pelayanan di masa mendatang.

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan SKTM di Kantor Desa Bandur Picak

Kegiatan inti berupa sosialisasi pelayanan SKTM dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu (1) sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan (2) pendampingan pelayanan di kantor desa. Pada kegiatan sosialisasi langsung, mahasiswa memberikan penjelasan mengenai fungsi SKTM, alur pengurusan, dan dokumen persyaratan. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka kepada masyarakat yang datang ke kantor desa maupun melalui pertemuan kelompok kecil di lingkungan warga.

Pada kegiatan pelayanan, mahasiswa terlibat dalam beberapa aspek utama pelayanan, meliputi:

1. Penerimaan pemohon

Mahasiswa menyambut pemohon, menanyakan tujuan kedatangan, dan mengarahkan persyaratan berkas.

2. Verifikasi Berkas Awal

Mahasiswa memeriksa kesesuaian data identitas dalam KTP dan KK sebelum diproses oleh aparat.

3. Penyusunan Draft SKTM

Mahasiswa menyusun surat dengan format resmi desa menggunakan bahasa administratif yang sesuai.

4. Pencatatan dalam Register Pelayanan

Mahasiswa mencatat nama pemohon, nomor surat, dan keperluan pelayanan pada buku register sebagai bentuk dokumentasi administratif.

5. Penyerahan Dokumen kepada Pemohon

Penyerahan dilakukan setelah surat ditandatangani oleh Kepala Desa.

Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya SKTM. Berdasarkan wawancara informal, warga mengaku lebih memahami tujuan dan cara mengurus SKTM secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan pihak lain. Selain itu, mahasiswa membantu mempercepat proses pelayanan karena aparat desa dapat terbantu dalam hal administrasi teknis.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini juga mendorong aparat desa untuk lebih tertib dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan arsip surat. Sebelumnya, beberapa dokumen SKTM belum terdokumentasi dengan baik, namun setelah kegiatan ini dilakukan pembenahan sistem register surat keluar.

Melalui kegiatan pengabdian ini, jika diamati dari beberapa aspek pelayanan, seperti aspek kecepatan pelayanan, ketepatan prosedur administrasi, kemudahan, dan kepuasan masyarakat, dapat dinilai bahwa pelayanan SKTM di Desa Bandur Picak sudah efektif. dinilai efektivitas. Tiap aspek efektivitas pelayanan SKTM di Desa Bandur Picak berdasarkan indikator yang diamati selama kegiatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Aspek Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Bandur Picak

Aspek Efektivitas	Indikator Lapangan	Kondisi di Desa Bandur Picak
Kecepatan Pelayanan	Waktu penyelesaian dokumen	±5 menit per surat

Aspek Efektivitas	Indikator Lapangan	Kondisi di Desa Bandur Picak
Ketepatan Prosedur	Kelengkapan berkas, verifikasi, tanda tangan	Sesuai SOP internal desa
Kemudahan	Pelayanan tidak birokratis (berbelit-belit), dan tidak ada biaya tambahan	Sesuai dengan SOP internal desa
Kepuasan Masyarakat Respon terhadap pelayanan		Mayoritas menyatakan puas, meskipun sebagian mengeluhkan antrian saat jam sibuk

Berdasarkan hasil observasi, waktu penyelesaian dokumen rata-rata hanya sekitar lima menit, menunjukkan pelayanan yang cepat dan efisien. Prosedur penerbitan juga berjalan sesuai dengan standar operasional internal desa, mulai dari pemeriksaan berkas, pencatatan register, hingga penandatanganan surat oleh kepala desa. Selain itu, pelayanan dilakukan tanpa biaya tambahan, sehingga masyarakat merasa terbantu dan tidak terbebani dalam pengurusan administrasi.

Sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini terlihat dari komentar warga yang menyatakan prosesnya cepat dan mudah dipahami. Meski demikian, beberapa warga mengeluhkan waktu tunggu yang lebih lama pada waktu-waktu sibuk, saat petugas tidak lengkap atau ketika terjadi gangguan teknis seperti pemadaman listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan masih bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Sejalan dengan temuan Alfenia *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan aparatur dan fasilitas pendukung sering menjadi kendala utama dalam menjaga konsistensi efektivitas pelayanan publik di desa. Selain itu, penelitian Sussilo dan Sukmana (2024) juga menegaskan bahwa pelayanan administrasi di desa kerap menghadapi kendala teknis dan kesiapan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap kecepatan dan kepuasan masyarakat.

Namun dengan adanya kegiatan pengabdian melalui program magang ini, aparatur desa merasa terbantu oleh mahasiswa dalam upaya peningkatan pelayanan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yaitu untuk berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun untuk dapat direalisasikan, dengan bersosialisasi, berinteraksi dengan kehidupan dilingkungan masyarakat dalam suatu tempat atau wilayah tertentu (Silitonga *et al.* 2024).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian melalui program magang di Desa Bandur Picak menunjukkan bahwa pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi yang memiliki urgensi sosial bagi masyarakat, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses bantuan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kegiatan sosialisasi terkait SKTM telah berjalan baik yang berdampak pada pelayanan SKTM telah berjalan dengan prosedur yang jelas dan sederhana, dengan persyaratan yang mudah dipenuhi serta waktu pelayanan yang relatif singkat. Melalui kegiatan sosialisasi mahasiswa terlibat langsung dalam menginformasikan tahapan prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan SKTM. Disamping itu, mahasiswa turut serta melakukan proses pelayanan kepada masyarakat, dan berperan sebagai pendamping administratif yang membantu aparatur desa dalam memberikan informasi, verifikasi berkas, penyusunan surat, pencatatan register, dan penyerahan dokumen kepada pemohon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, yang telah memberikan izin, dukungan, dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengabdian ini melalui kegiatan magang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, yang telah memfasilitasi kegiatan akademik dan magang di lapangan. Penulis menghargai bantuan seluruh aparatur desa dan masyarakat Desa Bandur Picak yang saling membantu, memberikan pembelajaran, dan pengalaman selama proses magang, sehingga kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfenia, N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). The Effectiveness of Village Governments in Improving the Quality of Public Services. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(4), 218-225. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6358229>
- Bulonggodu, Y., Isa, R., & Tohopi, R. (2024). *The effectiveness of public services at the Pangi Village Office, Suwawa Timur Sub-District. Public Policy Journal*, 5(1), 1–10. Gorontalo State University.
- Choiriyah, I.S., Mursyidah, L., Sukmana, H., Agustin, I.F. (2021). The Role of the Village Government in Improving Public Services for the Keboansikep Village Community. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 02(01): 1-11.
- Herdiana, D., Royani, Y. M., & Wahidah, I. (2022). The Public Value of e-Government at The Village Level. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/18011>
- Juniati, S. R. (2022). *Efektivitas pelayanan publik era new normal di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. JIAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 56–66. Universitas Muhammadiyah Sinjai.

- Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2022). *Pelayanan publik dalam good governance. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1), 43–49. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya & Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Puspitasari, P., & Syugiarto, S. (2024). *Kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Paradigma: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 135–142. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu. <https://doi.org/10.55100/paradigma.v3i2.70>
- Rahmat, I.R., Pasciana, R. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(02):25 – 44.
- Silitonga, A.Y., Septiani, A.T., Irhamna, Faturrahman, Pasya, N., Rhamadani, S., Diva, R., Sebayang, K., Kusniadi, A.I., Nabila, N., Ananda, N.D. 2024. Peran Mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat untuk Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu. *VISA: Journal Visions and Ideas*, 4(1): 121 – 127. DOI: [10.47467/visa.v4i1.1293](https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1293)
- Susanti, E., Rijali, S. 2023. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 1037–1047. Retrieved from <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/873>
- Sussilo, T., & Sukmana, H. (2024). Population Administration Services and Village Government Performance Analysis: Analisis Layanan Administrasi Penduduk terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24, 10.21070/ijppr.v24i0.1332. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1332>
- Wicaksono, B., Yusri, A., Asrida, W., Wazni, Rafi, M., Pane, R.P. (2024). Implementation of Good Governance as An Acceleration of Public Services at The Village Level. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(7): 1966-1972.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, 3(2): 147-153. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>